

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Amerika Serikat adalah negara yang memiliki tingkat kemajuan tinggi dari banyak bidang. Perkembangan pesat mereka juga dapat dilihat dari berbagai macam teknologi baik itu teknologi informasi hingga militer. Amerika Serikat dan teknologi menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan lagi. Keduanya saling membutuhkan. Oleh karenanya, sektor teknolog tidak dapat dipisahkan oleh politik dalam perkembangannya. Secara tidak langsung teknolgi mempengaruhi politik baik dalam maupun luar negeri.

Dalam perkembangan sejarahnya, Amerika Serikat hampir selalu mempunyai kompetitor dibidang teknologi. Biasanya negara yang dianggap kompetitor berasal dari negara-negara yang berseberangan dengan Amerika Serikat itu sendiri. Sebagai contoh kompetitor Amerika Serikat adalah Uni Soviet dimasa lalu, yang pada akhirnya memaksa Amerika Serikat sesegara mungkin menerbangkan Amstrong ke bulan. Saat ini Amerika Serikat memiliki kompetitor baru yakni Tiongkok.

Angka pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator yang diperhatikan dalam menilai tingkat kesejahteraan sebuah negara. Inilah mengapa para pemegang kekuasaan di berbagai negara terus berusaha untuk meningkatkan pertumbuhannya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi tersebut, negara-negara di dunia kerap melakukan berbagai kerja sama, salah satunya adalah kerja sama di bidang perdagangan.

Amerika Serikat merupakan negara yang memegang andil yang besar dalam perekonomian internasional. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh AS hampir selalu berhasil membawa pengaruh terhadap sistem perekonomian internasional. Dengan pengaruh yang besar ini, membuat AS memiliki daya tarik tersendiri bagi negara-negara lain untuk dijadikan partner kerja sama. Tiongkok, sebagai negara yang juga memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian dunia juga memiliki hubungan yang erat dengan AS khususnya dalam bidang kerja sama perdagangan. AS dan Tiongkok sendiri memang telah lama memulai hubungan kerja sama mereka. Pada tahun 2017, China masuk dalam urutan tiga besar negara tujuan ekspor AS. Angka ekspor AS ke Tiongkok pun meningkat sekitar 12,4% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di sisi lain, masih pada tahun yang sama, Tiongkok pun menjadi penyedia barang impor terbesar bagi AS namun dengan jumlah yang lebih besar jika dibandingkan dengan angka ekspor AS ke China. Angka ekspor barang dagang AS ke Tiongkok pada tahun tersebut adalah sebesar 129,9 miliar dollar AS dan angka ekspor barang dagang Tiongkok ke AS berkisar sejumlah 426,6 miliar dollar AS.

Dari data yang disebutkan di atas, dapat diketahui bahwa neraca perdagangan AS memiliki nilai defisit terhadap Tiongkok. Selanjutnya, di tahun 2018, nilai defisit ini sempat menurun namun kembali naik dan menjadi angka defisit tertinggi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Posisi ini tentunya dianggap kurang menguntungkan bagi AS. Sedangkan bagi Tiongkok yang neraca perdagangannya surplus terhadap AS, kondisi ini justru merupakan kabar baik. Ini membuktikan bahwa posisi Tiongkok semakin kuat dalam bidang perdagangan internasional dan menjadi ancaman serius bagi perekonomian Amerika.

Kembali ke AS, Donald Trump yang menjabat sebagai Presiden AS kala itu berusaha untuk memperbaiki posisi yang kurang menguntungkan tersebut dengan mengurangi angka defisit. Upaya-upaya yang dilakukan Trump dalam mengurangi angka defisit tersebut salah satunya ialah dengan

memberlakukan serta menaikkan tarif bagi beberapa barang impor Tiongkok. Mengetahui kebijakan ini, pemerintah Tiongkok pun merespon dengan hal yang sama, yaitu Tiongkok juga memberlakukan serta menaikkan tarif bagi beberapa barang impor AS. Dengan adanya kondisi balas membalas ini, perang dagang antara kedua negara pun menjadi sulit untuk dihindari (Farrassati, 2019).

Sama seperti halnya Amerika Serikat, Tiongkok telah berkembang menjadi negara dengan teknologi yang maju. Perkembangan ini juga diikuti dengan perkembangan ekonomi Tiongkok. Tiongkok telah mencapai hasil ekonomi yang luar biasa selama 40 tahun terakhir, baik dari segi kuantitas (pertumbuhan ekonomi) dan kualitas, banyak digunakan teknologi tinggi, perluasan basis penelitian ilmiah, mencapai kepemimpinan global tentang pendaftaran paten.). Pada 2014, PDB Tiongkok menyusul dan melampaui AS dalam hal paritas daya beli, menjadikan Tiongkok ekonomi terbesar di dunia. Tiongkok telah memperoleh kepemimpinan dunia yang cukup terlihat di sejumlah bidang teknologi, yang mana berarti, bahwa mereka menguasai semua sektor (atau sub-sektor) sepenuhnya secara mandiri dari semua produsen lain di dunia. Contohnya termasuk perkembangan teknologi 5G. Teknologi 5G memungkinkan kemampuan Artificial Intelligence (AI), otomatisasi, robotisasi dapat sepenuhnya luas dieksploitasi. Bukan hanya pertanyaan tentang siapa yang memproduksi smartphone atau laptop terbaik, tetapi lebih lanjut ke transisi besar-besaran ke kualitas baru di hampir setiap aspek kehidupan modern (produksi, transportasi, komunikasi, militer, dan lain-lain). Kini, Huawei merupakan pedagang perangkat jaringan telekomunikasi terbesar di dunia. Dari perusahaan rintisan hingga menjelma menjadi perusahaan seperti Apple, Huawei kini menjual lebih banyak telepon pintar dibandingkan Apple. Huawei sendiri selama ini berkerjasama dengan Google dan Android terkait sistem operasi teknologinya yang mana selanjutnya pengguna Huawei tidak akan lagi menggunakan sistem Android yang juga akan kehilangan Google Play Gmail dan lainnya dibawah perusahaan besar Google. Tindakan

Amerika Serikat berpengaruh pada sejumlah pemerintah di seluruh dunia yang juga ikut memblokir perusahaan telekomunikasi untuk menggunakan perangkat Huawei dalam jaringan 5G generasi-berikutnya. (BBC, 2019).

Inilah yang membuat kekhawatiran besar Amerika dari teknologi 5G ini bisa menjadi ancaman keamanan bagi Amerika dikarenakan penyebaran teknologi perangkat Huawei luas, rentan pencurian data cyber asing di wilayah Amerika yang membuat kekhawatiran Amerika sendiri, jika infrastruktur 5G menggunakan produk Huawei, para pesaing mengklaim Huawei "bisa membaca pesan yang dikirim melalui jaringan atau bahkan mematikan jaringan, yang tentu akan menyebabkan gangguan serius" (BBC, 2019).

Seluruh perusahaan yang masuk dalam daftar ini dilarang membeli komponen dalam bentuk apapun dari perusahaan AS tanpa persetujuan pemerintah AS. Tidak sampai disana, Pemerintah Amerika Serikat juga melarang perusahaannya berkerja sama dengan Huawei. Perkembangan teknologi Tiongkok ini membuatnya menjadi yang terdepan dari negara lainnya, yang mana di era pasar bebas saat ini memungkinkan setiap negara berkompetisi secara bebas tanpa hambatan. Sejatinnya hubungan Amerika Serikat dan Tiongkok tidak pernah terbilang akur. Terpilihnya Donald Trump dan kebijakan-kebijakannya membuat hubungan kedua negara semakin memanas yang mangacu pada perang dagang antara dua negara. Salah satu hal yang membuat situasi ini kian panas adalah pemerintah AS memasukkan nama Huawei ke dalam blacklist sebagai brand yang terlarang dalam urusan perdagangan. Pemerintah AS tak hanya memasukkan nama Huawei, ada pula sebanyak 70 afiliasi Huawei yang ikut serta dimasukkan ke dalam daftar hitam bernama "entity list" tersebut (Pratomo, 2019).

Huawei adalah perusahaan komunikasi nomor satu dari Tiongkok, yang mana setiap tahunnya Huawei selalu mengalami peningkatan. Huawei Global mengumumkan

pencapaian pendapatan bisnisnya di kuartal ketiga 2019. Selama tiga kuartal pertama tahun ini, Huawei Global telah berhasil mencapai total pendapatan CNY 610,8 miliar atau senilai lebih dari Rp 1.220 triliun, meningkat 24,4% tahun ke tahun. Pendapatan bersih Huawei Global pada periode ini adalah sebesar 8,7%. (Huawei, 2019)

Dewasa ini, perdagangan lintas negara atau perdagangan internasional semakin giat dilakukan. System perdagangan bebas dunia adalah salah satu alasan mengapa hal itu terjadi. System perdagangan bebas membuat hambatan-hambatan yang ada dalam perdagangan internasional semakin minim. Namun di sisi lain, hal ini juga membuat persaingan di pasar internasional semakin ketat.

Pasar bebas memiliki berbagai tujuan, antara lain dapat membuka peluang ekonomi yaitu dengan cara memperluas pasar hingga tingkat manca-negara. Produsen-produsen yang tadinya hanya menjual produk-produk di dalam negeri dapat dengan mudah memasarkannya ke luar negeri karena adanya system pasar bebas. Kemudian, ketiadaan pajak juga membuat jangkauan pasar menjadi semakin luas karena tidak terhalang oleh keharusan untuk membayar pajak antarnegara yang relatif mahal. Terbukanya pasar juga memudahkan para produsen dalam negeri untuk mengeksport produknya dalam jumlah besar namun dengan biaya ekspor yang rendah. Aktivitas ini secara tidak langsung mampu mendukung peningkatan perekonomian negara. Kemudian, kondisi pasar yang lebih luas membuat permintaan produk yang lebih besar juga sehingga semakin banyak permintaan pasar maka akan semakin besar pula peningkatan ekonomi yang terjadi. Selain itu, pasar bebas secara tidak langsung juga membantu pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Hal ini dikarenakan tidak semua barang yang dibutuhkan penduduk di suatu negara dapat diproduksi di dalam negeri, sebagian jenis barang harus diimpor untuk dapat memenuhi kebutuhan (Utami, 2021).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan rumusan masalah dalam pertanyaan sebagai berikut: Mengapa Presiden Trump melarang Huawei masuk ke pasar Amerika Serikat pada tahun 2019?

C. Kerangka Teori

1. Konsep Kepentingan Nasional

Menurut Hans J. Morgenthau, kepentingan nasional adalah dua hal mirip dengan ‘konsep umum’ dalam konstitusi Amerika, seperti kesejahteraan umum dan hak perlindungan hukum. Konsep itu memuat arti minimum yang inheren di dalam konsep itu sendiri, tetapi di luar pengertian minimum itu bisa diartikan dengan berbagai macam hal-hal yang secara logis berpadanan. Ditentukan oleh tradisi politik dan konteks kultural keseluruhan dalam negara merumuskan politik luar negerinya.

Arti minimum yang inheren dalam konsep kepentingan nasional adalah kelangsungan hidup (survival). Tetapi, kelangsungan hidup siapa? Dalam pandangan Morgenthau, kemampuan minimum negara-bangsa adalah melindungi identitas fisik, politik, dan kulturalnya dari gangguan negara-negara lain. Lebih spesifik lagi, negara-bangsa harus bisa mempertahankan integritas teritorialnya (yaitu identitas fisiknya), mempertahankan rezim ekonomi-politiknya (identitas politik), yang mungkin saja demokratis, otoriter, sosialis, atau komunis, dan sebagainya; serta memelihara norma-norma etnis, religious, linguistic, dan sejarahnya (identitas kulturalnya). Menurut Morgenthau, dari tujuan-tujuan umum ini para pemimpin suatu negara bisa menurunkan kebijaksanaan-kebijaksanaan spesifik terhadap negara lain, baik yang bersifat kerjasama maupun konflik. Misalnya, perlombaan persenjataan, perimbangan kekuatan, pemberian bantuan asing, pembentukan aliansi, atau perang ekonomi dan propaganda. (Mas'ood, 1990)

Konsep kepentingan termasuk dalam substansi politik, maka mempunyai sifat abadi dan tidak terpengaruh oleh waktu dan tempat. negara nasional adalah produk historis dan tidak lain adalah perubahan. Jadi hubungan antara kepentingan dan negara nasional berubah dengan perubahan waktu dan tempat. "Selama dunia secara politis diorganisasikan ke dalam negara-negara, elemen penting dari kepentingan nasional, yaitu, kelangsungan hidup, adalah kata terakhir dalam politik dunia. Dengan kata lain, kebijakan luar negeri yang didasarkan pada kelangsungan hidup mudah didukung oleh bipartisanship.

Keaslian elemen-elemen yang dapat berubah dari kepentingan nasional harus diputuskan dengan adanya "kemungkinan perebutan oleh kepentingan subnasional, nasional lainnya, dan supranasional. Pada tingkat pertama, kepentingan kelompok ras dan ekonomi selalu berusaha memberikan pengaruh pada operasi. kebijakan luar negeri Amerika, mengidentifikasi kepentingan mereka dengan kepentingan nasional, namun mereka tidak selalu berhasil dalam menentukan arah kebijakan luar negeri Amerika. (ken, 1969)

Kepentingan Nasional dalam Bahasa perancis *raison d'Etat* adalah tujuan dan ambisi negara, baik ekonomi, militer, budaya. Menurut aliran arus utama dalam studi HI konsep sebagai dasar yang penting bagi negara dalam Hubungan Internasional. Mengenai Kepentingan Nasional Machiavelli berargumen hal ini banyak dirujuk dalam praktik atupun pengembangan teoritis, sebagai pembenaran bagi perilaku internasional negara yang mengabaikan kepentingan utama pada masa purba sebelumnya, yaitu agama dan moralitas. Negara diturunkan dari tatanan ilahi dan tunduk pada kebutuhan khususnya sendiri, yaitu Kepentingan Nasional.

Power sebagai instrument penting negara dan tujuan khususnya yang bersifat destruktif (hard power). Ketika kepentingan nasional bertujuan untuk mengejar power dan dipergunakan sebagai instrumen mencapai kepentingan

nasional, maka konsekuensinya dalam system internasional yang dipersepsikan anarki kecuali kekuasaannya sendiri adalah kompetisi, kemunculan perimbangan kekuasaan, konflik dan perang.

Praktik sejarah yang mementingkan kepentingan nasional besiringan dengan konsekuensinya, dapat ditelusuri melalui kisah hubungan internasional yang bersifat kompetitif dan konflikktual selama berabad-abad, khususnya di Eropa. Seperti, perang tiga puluh tahun. Perang-perang perimbangan kepentingan nasional. Perang-perang dunia, dan perang dingin. Sampai praktik kolonisasi berbasis merkantilisme (kepentingan nasional) ialah bentuk instrument kepentingan nasional yang agresif. (Rachman, 2018)

Di era kepemimpinan trump terlihat jelas bahwa ketatnya perdagangan internasional Amerika serikat di dunia bebas yang dilakukan, sejak munculnya isu Sunrise Tiongkok dalam upayanya ingin memajukan pasar dunia, terutama di bidang elektronik yang terlihat jelas perkembangan teknologi Tiongkok lebih cepat berkembang, khususnya di jaringan komunikasi yang muncul dengan system AI dan juga semenjak kemunculan sistem jaringan 5G di dunia teknologi, Sejatinya Amerika melihat seperti adanya kemungkinan perpindahan kekuasaan pasar domestik, ataupun internasional yang ditandai dengan peningkatan pemakaian Gadget Huawei di Amerika serikat yang mulai merambak di berbagai kalangan, Huawei yang mulai menunjukkan kualitasnya di pasar dunia gadget.

Keuntungan absolut maupun relatif sejatinya terkait dengan kepentingan nasional suatu negara. Pembahasan tentang disparitas keuntungan absolut-relatif ini memungkinkan ke depan menjadi sebuah relevansi yang tidak proporsional lagi untuk dipisahkan, terlebih diperdebatkan. Namun sebagai awal patut disadari bahwa tak sedikit pengertian maupun pemaknaan “kepentingan nasional” secara umum yang bisa disarikan sebagai contoh melalui berbagai buku dan jurnal (baik pada tingkat nasional maupun internasional). Hal ini mengingat

secara etimologis kata nasional menurut tradisi yang berkembang di dalam paham realisme sudah pasti terkait erat dengan eksistensi dan keberlangsungan negara. Sebagaimana terekspos jelas dalam paradigma realisme bahwa manusia sebagai individu merupakan makhluk yang lemah namun berhasrat.

Dalam praktik dan sejarah berjalannya negara berdaulat, hal terkait perumusan kebijakan luar negeri suatu negara justru tampak menyajikan disparitas yang cukup tegas antara konteks kepentingan negara dengan kepentingan masyarakat. Namun demikian, bukan lantas kepentingan nasional tak mampu dirasionalisasi menjadi kepentingan umum yang mencakup isu keamanan komprehensif masyarakat di suatu negara, hal tersebut sangat mungkin dan terbuka untuk dilakukan. Menyatakan secara taklid dan terburu-buru bahwa kepentingan nasional adalah representasi mutlak kepentingan individu dan masyarakat tanpa memahami esensi dari pembentukan dan proses rasionalitasnya justru akan menggiring kita “kehilangan” pemahaman paling fundamental tentang makna kepentingan nasional. (Arifiyanto M. L., 2017)

Meski dalam beberapa periode pemerintahan AS tampak tidak terlalu menaruh perhatian serius terhadap kekuatan militernya (semisal pada periode Barack Obama pemerintah AS terlihat begitu persuasive memainkan demokrasi), namun demikian bukan berarti AS tak serius dalam melanggengkan trajektori kepentingan hegemoninya berbasis kekuatan militer, sebagaimana hal tersebut masih menjadi rasionalitas paling mendasar bagi para elit pemangku kebijakan di tataran negara. Sekali lagi untuk ditegaskan bahwa keamanan negara berdasarkan fitur perjanjian Westphalia adalah kemutlakan yang harus didorong melalui kekuatan militer yang kuat dan maksimal. Sehingga keamanan yang komprehensif akan menjadi titik tumpu bagi isu-isu lain semacam ekonomi, energi, sosial, dan budaya untuk diaktifkan.

Kendati selalu dimungkinkan memperoleh keuntungan absolut dari demokrasi, AS juga mesti senantiasa mempertimbangkan situasi dan kondisi yang adaptif, alih-alih bersiaga penuh dengan sikap pre-emptivenya terhadap kemungkinan-kemungkinan hadirnya ancaman lain di luar gelaran militer dan persenjataan. Yaitu meningkatnya intensitas kerjasama antar negara secara radikal, meluasnya skema perdagangan dan pasar bebas, serta menguatnya kompetitor lain (semisal Tiongkok) yang akan berpengaruh signifikan pada kelangsungan eksistensi hegemoni AS secara global. (Arifianto M. L., 2017)

D. Hipotesa

Dari kerangka pemikiran diatas dapat ditarik hipotesa, bahwa Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan pelarangan Huawei di pasar Amerika Serikat tidak lain demi kepentingan nasionalnya yaitu :

1. Mengancam keamanan Amerika dengan perkembangan teknologi 5G dari Huawei
2. Mengancam perekonomian Amerika dengan defisit yang terus mengalami penurunan semenjak dominasi Huawei

E. Jangkauan Penelitian

Sesuai dengan tema yang akan dibahas, penelitian ini melingkupi rentang waktu 2018 dimana Huawei kehilangan dukungan dari AT&T hingga Juli 2019 dimana Trump mengatakan pelonggaran pembatasan Huawei hanya berlaku untuk produk yang tersedia secara luas.

F. Metode Penelitian

- a. Metodologi Tipe Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode analisa kualitatif.
- b. Sumber dan Jenis Data
Dalam penelitian ini, jenis data yang akan digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan

berupa buku, jurnal, artikel, koran, dokumen, dan bahan dari internet.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah studi pustaka (library research) yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi yang relevan dari literatur yang berkaitan dengan masalah yang menjadi objek penelitian.

d. Teknik Analisa Data

Teknik analisa yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Metode kualitatif yang digunakan sebagai prosedur penelitian akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun yang terucapkan dari para pelaku yang diamati.

G. Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan yang dapat menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan atau dapat memecahkan suatu permasalahan yang terdapat dalam batasan masalah. Dalam hal ini penulis menganalisa terkait Pelarangan Huawei masuk ke Amerika Serikat Oleh Trump serta Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) dan untuk syarat kelulusan di jurusan Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disajikan dengan pembahasan menurut pembagian bab-bab sebagai berikut :

BAB I merupakan bab pendahuluan yang berisikan aturan-aturan baku penulisan ilmiah yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teoritik, hipotesa, dan sistematika penulisan.

BAB II merupakan bab yang menjelaskan tentang perkembangan Huawei dalam proses menguasai pasar Amerika Serikat dan konflik yang terjadi.

BAB III merupakan bab yang menjelaskan tentang keluarnya kebijakan larangan Huawei di Amerika Serikat oleh Trump.

BAB IV merupakan bab penutup dan berisi tentang kesimpulan yang ditarik dari keseluruhan paparan fakta-fakta dan juga saran.

